

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan dan kemampuan umat manusia dengan cara menaikkan standar kehidupan, harga diri, dan kebebasan individu. Sedangkan pembangunan ekonomi merupakan suatu proses multidimensional yang menyangkut perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, kelembagaan nasional maupun percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan, dan penghapusan kemiskinan secara mutlak. (Todaro, 2011).

Menurut Sun'an dan Senuk (2015) tujuan pembangunan, termasuk pembangunan daerah, merupakan suatu kehendak masyarakat untuk mencapai suatu keadaan tertentu atau menghindari terjadinya keadaan tertentu dimasa mendatang. Oleh sebab itu faktor yang mempengaruhi corak pembangunan daerah dan sumber-sumber daya yang tersedia yang merupakan faktor-faktor yang benar-benar timbul di masyarakat, faktor ini merupakan keadaan yang ingin diciptakan oleh masyarakat pada masa yang akan datang. Dalam usaha pembangunan, pemerintah pada umumnya hanya menyediakan prasarana untuk memperlancar kegiatan perekonomian dan selanjutnya menyerahkan kepada pihak swasta untuk mengembangkan sektor ekonomi yang modern. Pemerintah daerah juga perlu untuk secara aktif mengadakan perencanaan atau program pembangunan daerah dengan adanya pelaksanaan desentralisasi.

Sistem desentralisasi diyakini mampu mewujudkan pembangunan ekonomi regional yang baik. Menurut UU No. 3 tahun 2004, pemberian otonomi

yang luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Melalui otonomi yang luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu aspek penting selain pertumbuhan ekonomi untuk melihat kinerja pembangunan adalah seberapa efektif penggunaan sumber-sumber daya yang ada sehingga lapangan kerja dapat menyerap angkatan kerja yang tersedia. Selain itu tolak ukur dalam keberhasilan pembangunan suatu negara juga dapat dilihat dari menurunnya jumlah penduduk miskin. Berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari lingkup daerah, regional, nasional, dan internasional. Di Indonesia, kemiskinan masih menjadi masalah penting, meskipun beberapa kebijakan sudah dilakukan.

Kemiskinan merupakan fenomena multidimensi. Menurut World Bank (2002) ada beberapa dimensi diantaranya dimensi sebagai kurangnya kesempatan, kurangnya pemberdayaan, dan kurangnya keamanan. Jendela kesempatan tetap tertutup untuk rakyat miskin, kurangnya pemberdayaan membatasi pilihan mereka di hampir segala sesuatu dan kurangnya keamanan membuat mereka rentan terhadap penyakit, kekerasan dan sebagainya.

Pengukuran tingkat kemiskinan di Indonesia pertama kali secara resmi dipublikasikan BPS pada tahun 1984 yang mencakup data kemiskinan periode 1976-1981. Sejak saat itu BPS tiga tahun sekali menghitung jumlah dan presentase penduduk miskin, yaitu pada saat modul konsumsi tersedia. Penduduk miskin merupakan penduduk yang berada di bawah garis batas miskin atau garis

kemiskinan. Berdasarkan hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978 menyebutkan bahwa seseorang dikatakan hidup sehat apabila dapat memenuhi kebutuhan energinya minimal 2100 kalori per hari. Berdasarkan pada ukuran tersebut, maka batas miskin atau garis kemiskinan untuk makanan adalah nilai rupiah yang harus dikeluarkan oleh seseorang dalam sebulan untuk dapat memenuhi kebutuhan energinya sebesar 2100 kalori perhari. (Usman et al, 2006)

Dari sisi ekonomi kemiskinan penyebabnya dibagi menjadi tiga yaitu : Pertama, secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya alam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia dikarenakan rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam akses modal (Kuncoro, 1997).

Apabila ini terus dibiarkan tanpa ada pemutusan rantai kemiskinan maka siklus yang ada terus berputar. Maka salah satu cara yaitu dengan memperbaiki kualitas sumber daya manusia yang bergerak sebagai motor penggerak perekonomian daerah.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia
Menurut Provinsi Tahun 2018 (ribu jiwa)

PROVINSI	JUMLAH PENDUDUK MISKIN
JAWA TIMUR	4292.15
JAWA TENGAH	3867.42
JAWA BARAT	3539.4
SUMATERA UTARA	1291.99
NUSA TENGGARA TIMUR	1134.11
LAMPUNG	1091.6
SUMATERA SELATAN	1076.4
PAPUA	915.22
ACEH	831.5
SULAWESI SELATAN	779.64
NUSA TENGGARA BARAT	735.62
BANTEN	668.74
RIAU	494.26
DI YOGYAKARTA	450.25
SULAWESI TENGAH	413.49
DKI JAKARTA	372.26
KALIMANTAN BARAT	369.73
SUMATERA BARAT	353.24
MALUKU	317.84
BENGKULU	303.55
SULAWESI TENGGARA	301.85
JAMBI	281.47
KALIMANTAN TIMUR	222.39
PAPUA BARAT	213.67
KALIMANTAN SELATAN	195.01
SULAWESI UTARA	189.05
GORONTALO	188.3
BALI	168.34
SULAWESI BARAT	152.83
KALIMANTAN TENGAH	136.45
KEP. RIAU	125.36
MALUKU UTARA	81.93
KEP. BANGKA BELITUNG	69.93
KALIMANTAN UTARA	49.59

Sumber : Badan Pusat Statistik 2019

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa terdapat beberapa provinsi yang memiliki jumlah penduduk miskin kisaran juta jiwa. Jawa Timur merupakan provinsi yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia.

Menurut Todaro (2011) bahwa variasi kemiskinan dinegara berkembang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: (1) perbedaan geografis, jumlah penduduk dan tingkat pedapatan, (2) perbedaan sejarah, sebagian dijajah oleh negara yang berlainan, (3) perbedaan kekayaan sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusianya, (4) perbedaan peranan sektor swasta dan negara, (5) perbedaan struktur industri, (6) perbedaan derajat ketergantungan pada kekuatan ekonomi dan politik negara lain da (7) perbedaan pembagian kekuasaan, struktur politik dan kelembagaan dalam negeri.

Timbulnya kemiskinan juga dikarenakan rendahnya kemampuan masyarakat mengakses lapangan kerja dan sedikitnya peluang masyarakat untuk mendapat kesempatan kerja. Pengangguran berhubungan erat dengan ketersediaan lapangan kerja, ketersediaan lapangan kerja berhubungan dengan belanja pembangunan. Dengan demikian, strategi pengoptimalan dan pengelolaan anggaran akan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi sektor-sektor pembangunan. Pertumbuhan ekonomi akan menekan tingkat pengangguran dan mengurangi jumlah kemiskinan di daerah (Setiyawati & Hamzah, 2007).

Tabel 1.2
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama di
Jawa Timur Tahun 2016 - 2018

Uraian	Satuan	2016		2017		2018
		Feb	Agu	Feb	Agu	Feb
Penduduk Usia Kerja 15 tahun ke atas	juta	30,03	30,17	30,31	30,44	30,57
Angkatan kerja	juta	20,50	19,95	20,89	20,94	21,00
Bekerja	juta	19,65	19,11	20,03	20,10	20,20
Penganggur	juta	0,85	0,84	0,86	0,84	0,81
Bukan Angkatan Kerja	juta	9,53	10,21	9,42	9,51	9,57
Sekolah	juta	2,33	2,32	2,18	2,17	2,22
Mengurus Rumah Tangga	juta	5,85	6,59	5,95	6,13	6,06
Lainnya	juta	1,35	1,30	1,28	1,21	1,29
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	68,27	66,14	68,93	68,78	68,71
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,14	4,21	4,10	4,00	3,85
Pekerja Tidak Penuh	juta	6,28	5,60	6,26	5,73	6,77
Setengah penganggur	juta	1,61	1,34	1,23	1,23	1,46
Paruh waktu	juta	4,66	4,26	5,03	4,49	5,31

Sumber: Badan Perencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur 2018

Kondisi ketenagakerjaan di Jawa Timur pada tabel 1.2 menunjukkan peningkatan jumlah angkatan kerja sebanyak 21 juta orang. Tingkat pengangguran turun sebesar 0,15 persen. Akan tetapi peningkatan jumlah angkatan kerja tersebut tidak serta merta berpengaruh terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang mengalami penurunan dari 68,78 persen menjadi 68,71 persen atau turun hanya sebesar 0,07 persen pada bulan Februari 2018 dibandingkan TPAK pada bulan Februari 2017 yang turun sebesar 0,22 persen.

Kemiskinan di Indonesia sampai saat ini masih menjadi masalah nasional. Kemiskinan mempunyai keterikatan dengan masalah-masalah sosial di Indonesia. Kemiskinan juga tidak luput melanda Jawa Timur. Untuk menurunkan tingkat kemiskinan perlu diketahui faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat

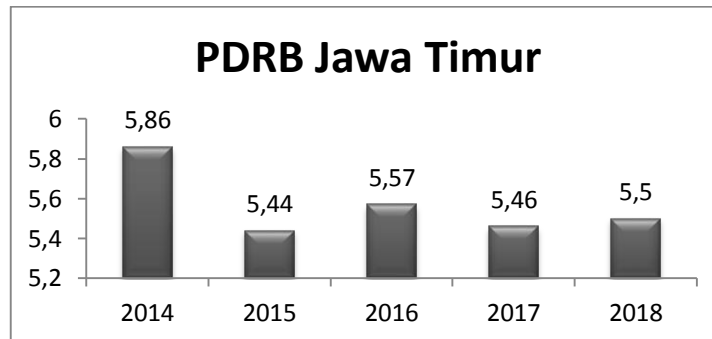
kemiskinan, sehingga dapat dirumuskan kebijakan yang efektif untuk menurunkan angka kemiskinan di Jawa Timur (Puspita, 2015).

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi kemiskinan. Kedalaman kemiskinan di tingkat pedesaan lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Kemudian upaya yang dilakukan pemerintah daerah salah satunya yaitu Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera (Jalin Matra). Program Jalin Matra memiliki tiga sasaran kegiatan yakni penanggulangan feminisasi kemiskinan, bantuan RSTM, dan penanggulangan kemiskinan. Program Jalin Matra selama 5 tahun berjalan telah menjangkau 48.143 rumah tangga sangat miskin di 752 desa seluruh Jawa Timur. Adapun kegiatan Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (PK2) telah menjangkau 814 desa. Program Jalin Matra ikut menumbang penurunan angka kemiskinan pedesaan di Jawa Timur.

Untuk mengatasi keadaan diatas, pemerintah dituntut untuk memikirkan berbagai tindakan yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, mengatasi masalah pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan pengangguran. Pendapatan dan belanja daerah dapat digunakan sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengatasi kemiskinan, dan mengurangi tingkat pengangguran. Pendapatan daerah tersebut mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), sedangkan belanja daerah mencakup belanja pembangunan.

Perbedaan PAD, DAU, DAK, dan belanja pembangunan yang berbeda antara daerah satu dengan daerah yang lainnya akan berdampak pada pertumbuhan yang berbeda pula, sehingga mengakibatkan penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan yang tidak sama antara daerah satu dengan yang lainnya (Setiyawati, 2007).

Grafik 1.1
Pertumbuhan Ekonomi menurut harga konstan provinsi Jawa Timur
Tahun 2014 - 2018



Sumber : Badan Pusat Statistik 2018

Pertumbuhan ekonomi juga merupakan kunci dari penurunan kemiskinan pada suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Dari PDRB atas harga konstan 2010, pertumbuhan ekonomi selama rentang waktu 2014 sampai dengan 2018 berada pada keadaan yang berfluktuasi. Dari tahun 2014 sebesar 5,86 persen dan turun pada tahun 2015 mencapai angka 5,44 persen. Hal ini dikarenakan adanya perlambatan ekonomi dunia yang berimbas terhadap perekonomian di Jawa Timur. Namun pada tahun selanjutnya pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur berjalan secara fluktuatif yang tidak terlalu tinggi selisihnya. Pada tahun 2018 PDRB Jawa Timur mencapai angka 5,5 persen.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur pada Tabel 1.3, jumlah penduduk miskin Jawa Timur saat ini sekitar 10,98 persen. Tingkat kemiskinan dalam kurun waktu 8 tahun terakhir (2011-2018) terlihat cenderung menurun, dari 14,27% pada tahun 2011 menjadi 10,98%. Presentase penduduk miskin di daerah perkotaan turun dari 7,13% (September 2017) menjadi 6,97% (September 2018). Sebanyak 66,03% dari total penduduk miskin di Jawa Timur berdomisili di desa. Sedangkan sisanya 33,97% tinggal di perkotaan (Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Jawa Timur 2019).

Tabel 1.3
Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur
(2010-2017)

Tahun	Tingkat Kemiskinan (%)
2011	14,27
2012	13,40
2013	12,55
2014	12,42
2015	12,34
2016	12,05
2017	11,77
2018	10,98

Sumber : Badan Pusat Statistik 2018

Pada tabel 1.4 dijelaskan bahwa tingkat kemiskinan tertinggi berada pada Kabupaten Sampang sebesar 21,21 persen. Disusul oleh Kabupaten Sumenep yang tingkat kemiskinan mencapai 20,16 persen. Daerah kantong kemiskinan masih seputar pulau Madura dan daerah tapal kuda lainnya. Kota Batu menempati urutan terakhir tingkat kemiskinan di provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 3.89 persen.

Sejarah mencatat, daerah tapal kuda merupakan sebuah nama daerah di provinsi Jawa Timur tepatnya di kawasan ujung bagian timur. Dinamakan tapal kuda, karena bentuk kawasan itu dalam peta mirip dengan bentuk tapal kuda. Daerah ini meliputi Kabupaten Pasuruan bagian timur, Kabupaten dan Kota Probolinggo, Lumajang, Jember, Situbondo, Bondowoso, dan Banyuwangi. Sejarah juga mencatat daerah tapal kuda merupakan tempatnya daerah kantong kemiskinan, rendahnya pendidikan, buruknya kesehatan, lambatnya kemajuan ekonomi, hingga daya beli yang rendah.

Tabel 1.4
Presentase Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota
Provinsi Jawa Timur Tahun 2018

Kabupaten/Kota	Presentase Penduduk Miskin	Kabupaten/Kota	Presentase Penduduk Miskin
Kab. Sampang	21.21	Kab. Magetan	10.31
Kab. Sumenep	20.16	Kab. Mojokerto	10.08
Kab. Bangkalan	19.59	Kab. Lumajang	9.98
Kab. Probolinggo	18.71	Kab. Jember	9.98
Kab. Tuban	15.31	Kab. Blitar	9.72
Kab. Ngawi	14.83	Kab. Jombang	9.56
Kab. Pamekasan	14.47	Kab. Pasuruan	9.45
Kab. Bondowoso	14.39	Kab. Banyuwangi	7.8
Kab. Pacitan	14.19	Kota Kediri	7.68
Kab. Lamongan	13.8	Kota Blitar	7.44
Kab. Bojonegoro	13.16	Kab. Tulungagung	7.27
Kab. Nganjuk	12.11	Kota Probolinggo	7.2
Kab. Trenggalek	12.02	Kota Pasuruan	6.77
Kab. Gresik	11.89	Kab. Sidoarjo	5.69
Kab. Situbondo	11.82	Kota Mojokerto	5.5
Kab. Madiun	11.42	Kota Surabaya	4.88
Kab. Kediri	11.31	Kota Madiun	4.49
Kab. Malang	10.37	Kota Malang	4.1
Kab. Ponorogo	10.36	Kota Batu	3.89

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur (2018)

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menulis penelitian dengan judul “Determinan Kemiskinan di Jawa Timur Tahun 2018” serta membandingkan kemiskinan di daerah Tapal Kuda dan Madura dengan daerah lain di Provinsi Jawa Timur.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018?
2. Bagaimana pengaruh angkatan kerja terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2018?
3. Bagaimana pengaruh Belanja Daerah terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2018?
4. Bagaimana kondisi kemiskinan di daerah Tapal Kuda dan Madura dibandingkan daerah kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Timur 2018?

1.3 Tujuan dan Manfaat

Tujuan

1. Mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018
2. Mengetahui pengaruh angkatan kerja terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2018
3. Mengetahui pengaruh Pendapatan dan Belanja Daerah terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2018
4. Mengetahui kondisi kemiskinan di daerah Tapal Kuda dan Madura dibandingkan daerah kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Timur 2018

Manfaat

1. Bagi akademisi, penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang terkait dengan penelitian ini.
2. Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah wawasan penulis tentang hal terkait lebih dalam lagi serta sebagai wadah untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama ini.
3. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan dan pengambilan keputusan, khususnya dalam menangani masalah kemiskinan yang ada di Indonesia.